

PENYELESAIAN PERSENGKETAAN DALAM BIDANG EKONOMI



Revisi Makalah

Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Rosmini

80100218096

Dosen/Pemandu:

Dr. H. Misbahuddin, M. Ag

Dr. Rahmawati Muin, M. Ag

**Program Magister Dirasah Islamiyah
Konsentrasi Syari'ah Dan Hukum Islam**

Pascasarjana

**UIN Alauddin Makassar
2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tak lupa pula kita kirimkan Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penyusunan makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah hokum ekonomi syari'ah dan semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembacanya walaupun jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan penulis kedepannya. Terima kasih

Samata, 14 Desember 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian sengketa.....	3
B. . Mekanisme penyelesaian sengketa	4
C. Sumber hokum dalam penyelesaian sengketa syari'ah	11
BAB III PENUTUP	16
A. Kesimpulan.....	16
B. Implikasi.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Setiap orang dipastikan memiliki hak yang dapat dilakukannya untuk memenuhi kehendaknya di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hak- yang dimiliki bersumber dari dua yakni dari undang-undang dan sumber dari perjanjian yang dibuatnya. Hak-hak yang dimilikinya tersebut, pemilik mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kecuali yang bersangkutan sengaja melepaskan haknya.¹

Hamper setiap manusia merupakan bagian dari system bisnis misalnya menyimpan dan meminjam uang di bank.² Memudahkan seseorang namun terkadang mencadi sebuah petaka ketika salah satu diantara kedua belah pihak melanggar.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.³

Sengketa dapat diartikan bahwa suatu persoalan yang bersumber dari adanya sebuah pelanggaran hak, dimana pihak yang merasa haknya dilanggar menuntut untuk melaksanakan haknya sedang pihak yang diduga sebagai pelanggarnya tidak tetap menghalanginya dan pihak yang merasa dirugikan haknya memerlukan penyelesaian.

¹ Candra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* (Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), h. 61.

² Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin Univercity Press, 2012), h. 3.

³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2011), h. 1.

Sengketa atau konflik hakekatnya bentuk actualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak sebagai konsekuensi kesepakatan para pihak yang bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak lain meskipun demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah mereka capai dan taati dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana sumber hukum dalam menyelesaikan ekonomi syari'ah?

C. Tujuan

1. Untuk memahami Mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Untuk memahami sumber hukum dalam menyelesaikan ekonomi syari'ah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa dalam kosa kata Inggris terdapat dua istilah yakni *conflict* dan *dispute* yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih tetapi dapat dibedakan. Kata *conflict* sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi konflik sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dalam kosa kata sengketa.⁴ Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.⁵ Menurut Ali ahmad bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁶ Sedangkan menurut Winardi adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau

⁴ Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi* (Surabaya; Media Sahabat Cendekia: 2019), h. 41.

⁵Fachmi Putri Ristanti, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (30 Mei 2014) <http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (diakses 8 Desember 2019).

⁶Erma muftia nihayatin, *penyelesaian sengketa ekonomi* (26 Mei 2016) <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html> (diakses 8 Desember 2019).

kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁷

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariat pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yakni:

1. Konflik data terjadi karena kurangnya informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data dan adanya perbedaan penafsiran terhadap procedural.
2. Konflik kepentingan. Setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerja sama, timbulnya konflik kepentingan disebabkan karena adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, adanya kepentingan substansi dari para pihak, adanya kepentingan procedural dan adanya kepentingan psikologi.
3. Konflik hubungan akan terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi dll.
4. Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuatan dan kekuasaan dll
5. Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideology dan agama dll.⁸

⁷Silpi Intan Suseno, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (6 Juli 2017) <https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi/> (diakses 8 Desember 2019).

Pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu social yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi dan konsumen terhadap barang dan jasa.⁹ Sedangkan ekonomi syariah menurut para ahli bahwa menekankan karakter konferensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan koperasi dan partisipasi.¹⁰

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa di bagi atas dua yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan (*non litigasi*). Indonesia sebagai suatu Negara yang terdiri atas berbagai macam ragam suku dan budaya, memiliki cara berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi kepada mereka. Secara garis besar, masyarakat pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara bermusyawarah dan menjadikan petua adat atau orang-orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang di hadapi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada masyarakat secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui pengadilan.¹¹

1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

⁸ Amran Suadi, *Penemuan Sengketa Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 31.

⁹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah* (Cet. I; Aria Mandiri, 2018), h. 2.

¹⁰ Juhaya S Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 57.

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* h. 8.

a. Negosiasi berasal dari kata *negotiation* yang artinya perundingan atau musyawarah. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan.¹² Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya.¹³ Tahapan Negoisasi menurut William Ury dibagi menjadi empat tahap yaitu :

1) Tahapan Persiapan :

- a) Persiapan sebagai kunci keberhasilan
- b) Mengenal lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan penelitian.
- c) Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan lawan sama dengan kepentingan anda.
- d) Sebaiknya persiapkan pertanyaan – pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan.
- e) Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan.
- f) Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama.
- g) Menyiapkan agenda, logistik, ruangan dan konsumsi dan Menyiapkan tim dan strategi.
- h) Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negotiated Agreement) alternative lain atau harga dasar (Bottom Line).

¹² Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, h. 47.

¹³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* h. 13.

- 2) Tahap Orientasi dan Mengatur Posisi :
 - a) Bertukar Informasi
 - b) Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
 - c) Mengajukan tawaran awal.
 - 3) Tahap Pemberian Konsensi/ Tawar Menawar
 - a) Para pihak saling menyampaikan tawarannya, menjelaskan alasanya dan membujuk pihak lain untuk menerimanya.
 - b) Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalanya.
 - c) Mencoba memahai pemikiran pihak lawan
 - d) Mengidentifikasi kebutuhan bersama
 - e) Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian.
 - 4) Tahapan Penutup
 - a) Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria obyektif.
 - b) Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen.¹⁴
- b. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada

¹⁴Intan Suseno, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (6 Juli 2017) <https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi/> (diakses 8 Desember 2019).

tangan para pihak yang bersengketa sehingga hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.¹⁵ Adapun tugas mediator yaitu:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan isepakati.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepeningan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹⁶

Adapun prosedur mediasi adalah sebagai berikut :

- 1) Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- 2) Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- 3) Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

¹⁵ Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, h. 47.

¹⁶Fachmi Putri Ristanti, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (30 Mei 2014) <http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (diakses 8 Desember 2019).

- 4) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.¹⁷
- c. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat keputusan tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa.¹⁸ Hakikatnya sistem peradilan Indonesia dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
- 1) Tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai conciliator atau majelis pendamai.
 - 2) Setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.¹⁹
- d. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan putusan.²⁰ Adapun asas- asas arbitrase:

¹⁷Herianti, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (16 Maret 2015) <http://anthyscrub.blogspot.com/2015/03/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (diakses 8 Desember 2019).

¹⁸ Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, h. 47.

¹⁹Silpi Intan Suseno, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (6 Juli 2017) <https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi/> (diakses 8 Desember 2019).

- 1) Asas kesepakatan artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
- 2) Asas musyawarah yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri.
- 3) Asas limitatif artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
- 4) Asas final and binding yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase.

Tujuan arbitrase adalah sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.²¹

2. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan / Litigasi

Penyelesaian sengketa secara kontroversional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, akan tetapi

²⁰Nusaib Taqiyya, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (4 Juni 2017) <https://nusaibahtaqiyya.wordpress.com/2017/06/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi/> (diakses 8 Desember 2019).

²¹Herianti, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (16 Maret 2015) <http://anthyscrub.blogspot.com/2015/03/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (diakses 8 Desember 2019).

lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pebisnis dengan sengketa menyangkut bisnis sehingga mulailah dipikirkan suatu alternative lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.²² Ada beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi:

- a. Penyelesaiannya sangat lambat
- b. Biaya perkara mahal
- c. Peradilan pada umumnya tidak responsive
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.²³

Penyelesaian sengketa memiliki beberapa ketentuan yang patut diperhatikan:

- a. Waktu penyelesaian perkara
- b. Pemanggilan para pihak
- c. Kualifikasi hakim
- d. Pembuktian
- e. Kepastian tentang kewenangan mengadili pengadilan agama
- f. Sumber-sumber hukum.²⁴

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini). Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah

²² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 311.

²³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 154.

²⁴ Herniate dan Sri Iin Hartini, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, h. 44-46.

kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum).²⁵ Contoh kasus seorang warga bandung bernama bapak Sugiharto Widjadja berumur 50 tahun bersengketa dengan sebuah bank swasta syariah ternama di kota bandung terkait kredit macet. Pada tahun 2014, ia membeli sebuah lahan dan bangunan di jalan Talagabodas seharga Rp. 20 milyar dengan 70 persen pembiayaan atau sekitar rp. 13 miliar dibiayai oleh bank syariah. Sisanya, sekitar rp. 7 miliar tersebut dibiayai oleh dirinya sendiri dengan cicilan rp. 136 juta perbulan yang sudah dibayarkan senilai rp. 1,3 milyar lebih.

Di tengah perjalanan, cicilannya bermasalah sehingga bank syariah tersebut menyita lahan dan bangunan tersebut dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung dan dimenangkan oleh pihak bank secara verstek atau tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Pihak bank kemudian melelang lahan tersebut ke KPKNL kota Bandung sekaligus memenangkan lelang dengan harga rp. 10 miliar.

Sugiharto meradang, ia melawan putusan tersebut dengan kembali melayangkan gugatan perdata ke PN Bandung dengan gugatan meminta PN Bandung untuk membatalkan putusan yang memenangkan bank syariah tersebut dengan alasan PN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut. Dasar hukumnya jelas bahwa undang-undang perbankan syariah dan Perma tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, apalagi selama ini bank syariah tersebut justru memberlakukan memberlakukan denda dan bunga. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap mediasi antara dua pihak sebelum siding gugatan tersebut dimulai.

²⁵Erma muftia nihayatin, *penyelesaian sengketa ekonomi* (26 Mei 2016) <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html> (diakses 8 Desember 2019).

Mediasi yang masih berlangsung hingga saat ini masih mentok belum menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak.

C. Sumber Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

1. Sumber hukum acara yang berlaku di pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku dilingkungan pengadilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan peradilan agama kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Disamping dua peraturan sebagaimana tersebut diatas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993.²⁶
2. Sumber Hukum Materil
 - a. Nash al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan. Syauqi al-Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 21 ayat yaitu Al Baqarah ayat 188, 275 dan 279, An Nisa ayat 5 dan 32, Hud ayat 61 dan 116, al Isra ayat 27, dan lain-lain.

²⁶Erma muftia nihayatin, *penyelesaian sengketa ekonomi* (26 Mei 2016) <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html> (diakses 8 Desember 2019).

Disamping ayat-ayat tersebut diatas sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat al Qur'an yang membahas tentang masalah ekonomi dan keuangan baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

- b. Nash al-hadits. Melihat kepada kitab-kitab Hadits yang disusun oleh para ulama hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu mempergunakan al Hadits sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah sangat dianjurkan pada pihak-pihak yang berwenang.²⁷
- c. Peraturan perundang-undangan. Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah.
- d. Aqad perjanjian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan-kesimpulan dari nash melalui ijtihad. Demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhaan kedua belah pihak, *konsekuensinya* apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan. Menurut Taufiq dalam

²⁷Erma muftia nihayatin, *penyelesaian sengketa ekonomi* (26 Mei 2016) <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html> (diakses 8 Desember 2019).

mengadili perkara sengketa ekonomi Syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja.

- e. Fiqih dan Ushul Fiqh. Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh tertentu berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.
- f. Adat kebiasaan. Jika masalah-masalah yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan As-Sunnah serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat islam.²⁸

²⁸Erma muftia nihayatin, *penyelesaian sengketa ekonomi* (26 Mei 2016) <http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html> (diakses 8 Desember 2019).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa yaitu dengan cara di luar pengadilan meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan meliputi pengadilan umum dan pengadilan niaga.

Sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yakni Sumber hukum acara yang berlaku di pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Sumber Hukum Materil meliputi al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, aqad perjanjian, ushul fiqh dan adat kebiasaan.

B. Saran

Pemakalah menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna maka dari itu diharapkan kepada pembaca mengkritik apabila ada kesalahan untuk perbaikan makalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Candra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Herianti. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (16 Maret 2015)
<http://anthyscrub.blogspot.com/2015/03/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>
(diakses 8 Desember 2019).
- Herniate dan Hartini, Sri Iin. *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya; Media Sahabat Cendekia: 2019.
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Univercity Press, 2012.
- Nihayatin, Erma Muftia. *penyelesaian sengketa ekonomi* (26 Mei 2016)
<http://ermamuftia.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-ekonomi-makalah.html>
(diakses 8 Desember 2019).
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syari'ah*. Aria Mandiri, 2018.
- Ristanti, Fachmi Putri. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (30 Mei 2014)
<http://fachmiputrir.blogspot.com/2014/05/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>
(diakses 8 Desember 2019).
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Suadi, Amran. *Penemuan Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Suseno, Silpi Intan. *Penyelesaian Sengкта Ekonomi* (6 Juli 2017)
<https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi/> (diakses 8 Desember 2019).
- Taqiyya, Nusaib. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi* (4 Juni 2017)
<https://nusaibahtaqiyya.wordpress.com/2017/06/04/penyelesaian-sengketa-ekonomi/> (diakses 8 Desember 2019).

Bahan perbandingan antara makalah tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini yang sebelumnya tidak menyinggung masalah contoh sengketa yang terdapat dalam masalah ekonomi syariah dan penulisan catatan kaki yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan UIN Alauddin Makassar.